POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2024-2026

TUJUAN PEMBANGUNAN

Reformasi Birokrasi yang Berprinsip *Good Governance* Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN PEMBANGUNAN

Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Kebijakan Publik

TUJUAN SATPOL PP

Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas

SASARAN SATPOL PP

1. Meningkatnya Masyarakat dan Satlinmas Mendapat Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

OPD Kab/Kota

OPD Provinsi

TNI dan POLRI

1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Meningkatnya perda dan perkada yang ditegakan
3. Meningkatnya pembinaan masyarakat Meningkatnya cakupan Satlinmas

Nilai SAKIP

Strategi

Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sinergi dan Inklusif di Provinsi Kalimantan Barat

Strategi

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Transparansi

Meningkatnya pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota Se-Kalimantan Barat

I : Persentase pencegahan kejadian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota Se-Kalimantan Barat

Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

I : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Tersedianya dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

I : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan

Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Pelindung Masyarakat.

I : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur.

I : Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

I : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

I : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada.

I : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada

Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

I : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.

I : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Aeasi Manusia.

I : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja

Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

I : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan

Meningkatnya Perda dan Perkada yang tegakan

I : Persentase Perda/Perkada yang ditegakan

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

I : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

I : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP.

I : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah

I : Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah

Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

I : Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

I : Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah

I : Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan

Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur

I : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda

I : Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda

Meningkatnya pembinaan PPNS Provinsi

I : Persentase PPNS yang kompeten

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda

I : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta

Terbentuknya Sekretariat PPNS

I : Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

I : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

I : Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS

Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah

I : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Tahapan

I : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

I : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah

I : Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah

I : Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah

I : Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

I : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah

I : Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasih

KEMENPAN RB

DIRJEN BINA ADWIL

= Cascading

= Cross Cutting

Pontianak,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat

Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701110 200212 1 005